

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pada negara maju, *Good Corporate Governance* (GCG) sudah lama menjadi suatu masalah yang populer dibicarakan orang. Hal ini antara lain dipicu oleh maraknya kegagalan bisnis yang melanda berbagai perusahaan, bahkan perusahaan besar sekalipun. Sebagai contoh Enron kolaps setelah adanya kecurangan keuangan oleh manajer eksekutifnya. Di Indonesia, istilah ini mulai sering menjadi bahan diskusi, sejak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997.

Krisis ini memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dipicu selama ini tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menggelindingkan roda bisnis dengan manajemen yang acak-acakan dan sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis yang terjadi di Indonesia menurut para praktisi dan pakar ekonomi salah satunya disebabkan oleh lemahnya atau bahkan tidak adanya *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia, baik itu perusahaan sektor publik maupun perusahaan sektor swasta.

Peristiwa Enron juga telah menyentak banyak kalangan dan hal ini telah membuka peluang pemikiran baru perlunya redefinisi tentang apa yang diharapkan

oleh para pemegang saham dari manajemen dan dewan komisaris. Era baru dalam dunia bisnis dengan distribusi pemilik yang sangat tersebar menghendaki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance* [GCG]) dari perusahaan dalam setiap aspek kegiatan dan bisnis di dalamnya. Salah satu aspek dari *Good Corporate Governance* (GCG) ini adalah masalah akuntabilitas dari manajemen dan dewan komisaris dalam menjalankan mandat dari pemegang saham.

Good Corporate Governance (GCG) meskipun bukanlah suatu konsep yang baru, tetapi pemahaman atas *Good Corporate Governance* (GCG) masih banyak yang keliru. Hal ini dikarenakan mereka menaksirkan sesuai kepentingannya. Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebatas bagaimana perusahaan menaikkan laba, menempatkan manajer dan karyawannya serta mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan.

Kesadaran tentang *Good Corporate* yang besar juga karena persepsi yang berubah tentang hubungan antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Tidaklah cukup hanya menilai keberhasilan suatu perusahaan dengan hanya mengkaitkan antara kinerja keuangan historisnya dengan peningkatan dalam menilai pemegang saham saja, tetapi yang terpenting adalah mempertimbangkan seberapa baik *Corporate Governance* ditetapkan. Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep *Good Governance* ini justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi.

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, serta masyarakat luas. *Governance* dalam pengertian publik *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial melibatkan sektor negara dan sektor non negara dalam suatu usaha kolektif untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. *Good Governance* sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

Dari paparan yang telah dikemukakan sebelumnya terlihat bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Proses pemahaman umum mengenai *Governance* atau tata pemerintahan mulai mengemuka sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara – negara pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Kata *governance* sering dirancukan dengan *government*. Akibatnya, negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan – perbaikan.

Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi lebih baik atau sebaliknya. Setiap organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik agar tujuan organisasi dan kepentingan – kepentingan *stakeholders* dapat tercapai secara

optimal. Menurut laporan *Corruption and fraud in Internasional Aid and Business Projects* (W. Michael Kramer, IIA Internasional Conference, Washington DC, Juni 2002) mengemukakan 10 (sepuluh) negara *top ten* terkorup dan Indonesia menduduki urutan ke empat sebagai *most Corrupt Countries*. Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh Mokinje dan company tentang praktik *Good Corporate Governance* di tujuh negara Asia (Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Indonesia) menempatkan Indonesia di posisi terbawah.

Hasil – hasil survei cukuplah memberikan pertanda bahwa sudah saatnya organisasi dan perusahaan – perusahaan di Indonesia di dorong untuk segera memperbaiki kualitas penerapan. *Good Corporate Governance di Indonesia seperti the Institute For Corporate Governance (IICG)*. *Good Corporate Governance* paling sering diartikan sebagai tata kelola yang baik. Setiap pedoman *Corporate Governance* biasanya tidak dimaksudkan untuk menerapkan begitu saja pada setiap organisasi atau perusahaan. Kebutuhan masing – masing perusahaan akan berbeda dan akan berkembang dari waktu ke waktu. Setiap negara atau perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan praktek – praktek *Corporate Governance* yang lebih detail sesuai dengan lingkungan masing – masing.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) menyatakan bahwa audit internal mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dengan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya. Mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap

profesi ini. Salah satu peran kunci audit internal yaitu untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Beberapa masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan auditor internal, adalah seberapa efektif keberadaan auditor internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

The Institute of Internal Auditor (IIA) menjawabnya dengan menetapkan kriteria dan standar profesi audit internal. Auditor Internal harus mampu menjaga profesionalitasnya adalah dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan fenomena yang menarik di tengah perbincangan mengenai peran auditor internal dewasa ini. Sejauh mana auditor internal berperan secara luas baik dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* pada publik maupun pada sektor swasta yang kini sudah menjadi tuntutan masyarakat luas.

Warta Pengawasan (2007 : 37) mengatakan bahwa ada fakta yang kurang baik soal posisi penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) di Indonesia dibandingkan Negara tahun 2005, yang bahkan disbanding dengan tahun 2004 pun terlihat menurun Indonesia menempati peringkat dan skor terendah untuk beberapa unsure penilaian terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Tahun 2004 Indonesia menempati peringkat terbawah dengan skor 40, di tahun 2005 konsisten dengan peringkat terbawah namun dengan skor lebih kecil 37.

Menyadari pentingnya fungsi audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG), penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai fungsi audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “ **FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*** “. (Studi kasus pada PT. UOB Buana Tbk.)

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu tonggak berlangsungnya *Good Corporate Governance* (GCG) adalah keberadaan audit internal yang keberadaannya akan sangat mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis merumuskan masalah – masalah yang diteliti, yaitu :

- a. Apakah pelaksanaan audit internal pada PT. UOB Buana Tbk. Sudah memadai ?
- b. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. UOB Buana Tbk. sudah dilaksanakan dengan baik ?
- c. Apakah audit internal telah berfungsi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. UOB Buana Tbk. ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah – masalah yang diidentifikasi di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui bahwa pelaksanaan audit internal pada PT. UOB Buana Tbk. sudah memadai.
- b. Untuk mengetahui bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. UOB Buana Tbk. telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Untuk mengetahui bahwa audit internal telah berfungsi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT UOB Buana Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Bagi Perusahaan

Memperluas wawasan manajemen akan perlunya sistem *Corporate Governace* dan sebagai bahan pertimbangan, dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, jika perlu dapat dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. Bagi Pembaca umumnya dan pada mahasiswa khususnya

Dengan hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai fungsi audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, menambah wawasan pengetahuan, serta untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

1.5 Rerangka Pemikiran

Ahmad Daniri ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, mengatakan belum ada definisi yang baku soal *Good Corporate Governance* ini. Intinya *Good Corporate Governance* adalah sebuah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder dan stakeholder.

Dengan penjelasan tersebut tentunya *Good Corporate Governance* dimaksudkan sebagai upaya mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

(*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumsi, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang dikutip dari Tjager et.al (2003:26) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

“ Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain sistem yang mengendalikan perusahaan.”

Peran akuntan perusahaan diperlukan dalam mewujudkan dan meningkatkan *Good Corporate Governance*, baik peran dari akuntan manajemen maupun auditor internal. Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi sistem akuntansi serta menilaisberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen yang dijalankan. Auditor internal merupakan salah satu profesi yang menunjang peningkatan *Good Corporate Governance*, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan secara sehat, dikutip dari Tunggal (2005:20).

Rumusan atau definisi audit internal ternyata mengalami perubahan yang yang luar biasa besar. Perubahan ini terkait dengan lingkungan yang berubah secara drastis terutama sejak tahun 1990-an. pada awalnya audit internal hanyalah berfungsi sebagai *watch dog*, kemudian berubah statusnya sebagai konsultasi/jasa konsultasi, dan kini diharapkan fungsi itu meningkat sebagai wahana yang dapat memberi nilai tambah (*add value*).

Definisi baru audit internal tidak hanya merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan auditor internal menuju

peran yang lebih luas dan mampu berpengaruh pada masa yang akan datang, dikutip dari Tunggul (2003:3) definisi baru tersebut adalah :

“ Internal audit is an independent, objective assurance and consulting activities designed to add value and improve an organization’s operations. It help an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disclipined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.”

Definisi di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah aktivitas yang independen, objektif dan aktivitas pemberi keyakinan yang memadai dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Audit internal juga dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Definisi tersebut membawa pada konsekuensi tuntutan peran yang harus dijalankannya. Dalam konteks sosial, peran seseorang harus sesuai dengan identitas dan memiliki norma yang menggambarkan posisi tertentu sesuai dengan spesialisasi koordinasi dan fungsinya. Definisi tersebut mencerminkan peran profesi audit internal sebagai fungsi penilaian yang independen dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi.

Berdasarkan uraian rerangka pemikiran diatas, penulis dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“ FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE “. (Studi kasus pada PT. UOB Buana Tbk.)**

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif menurut Nazir (2003:63) adalah sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta – fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan, dipelajari, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori yang telah dipelajari oleh penulis”.

1.6.1 Teknik – Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan penelitian terhadap objek yang dilakukan dengan :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian, dokumen-dokumen yang digunakan, guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut.

c. Kuesioner

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pimpinan dan personil perusahaan yang dianggap mampu dan berwenang dalam memberikan jawaban yang diperlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari bahan – bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan, seperti buku literatur, majalah – majalah dan lain – lain yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. UOB Buana Tbk. yang berada di Jalan Jendral Sudirman No. 55A, Bandung. Adapun lamanya penelitian dimulai pada bulan Agustus 2008 sampai dengan selesai.